

PEMUDA, ULAMA DAN PEMILU: Tinjauan Sosiologi Politik

Sunyoto Usman

Mengapa Pemilu harus diselenggarakan? Benarkah Pemilu diselenggarakan untuk menciptakan aparatur yang mengemban kedaulatan rakyat? Bukankah banyak negara yang telah berulang kali menyelenggarakan pemilu justru melemahkan, kalau tidak ingin dikatakan meniadakan, prinsip-prinsip demokrasi?

Satu hal yang telah menjadi keyakinan sebagian besar negara adalah Pemilu sebagai sarana demokrasi. Kendatipun tingkat kebebasan sistem politik itu berbeda-beda, namun sebagian besar negara percaya bahwa Pemilu dapat memperlihatkan pandangan bahwa rakyat turut serta menentukan siapa yang berhak memerintah mereka.¹ Keyakinan semacam itu pulalah yang melembaga dalam kehidupan politik kita.

Pada tahun 1997 mendatang, bangsa kita akan menyelenggarakan Pemilu yang ketujuh. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan sebuah "pesta demokrasi" yang pada saat itu rakyat yang mempunyai hak pilih datang bergelombang menghadiri rapat umum. Tidak lama lagi kita akan menyaksikan juru kampanye berpidato menjual serangkaian program agar

memperoleh dukungan. Paling tidak ada dua kelompok yang selama ini diyakini mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi perolehan suara organisasi politik kontestan Pemilu, yaitu kelompok pemuda dan kelompok ulama atau kiyai. Barangsiapa yang bisa menguasai dua kelompok ini, maka akan memperoleh banyak dukungan. Pandangan demikian tentu sangat beralasan. Kelompok pemuda adalah pemilih pemula yang jumlahnya cukup besar. Mereka relatif belum banyak makan garam kehi-

1. Jangam, R.T., *Political Sociology*, Oxford & IBH Publishing Co., (New Delhi, 1980), hal. 199-201 dan Philo C. Wasburn, *Political Sociology: Approaches, Concepts, Hypothesis*, (New Jersey: Prentice-Hall Inc., 1982), hal. 52-53

Dr. Sunyoto Usman, Staf Pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

pan politik, karena itu akan relatif sudah dipengaruhi. Banyak pengamat menyatakan bahwa kenaikan perolehan suara PDI pada Pemilu tahun 1992 yang lalu, terutama karena berhasil menawarkan kemasan yang menarik kelompok ini.

Sementara itu, kelompok ulama atau kiyai adalah panutan komunitas santri. Di kalangan komunitas santri, para kiyai memperoleh posisi yang sangat mulia, karena dengan kemampuan dan pengetahuannya itu para kiyai telah menempatkan dirinya sebagai ulama-ulama pewaris Nabi Muhammad saw, atau menjadi 'penggerak' utama proses sosialisasi ajaran Islam. Anggapan demikian dalam perkembangannya menjadi tali pengikat "emosi-religius" baik bagi lapisan bawah (yang kebanyakan bercirikan tradisional-agraris) maupun lapisan menengah yang telah mengenyam pendidikan modern. Perkembangan kemudian tradisi keagamaan, suatu kepatuhan yang hampir tanpa syarat. Tradisi kepatuhan tersebut kemudian melahirkan sikap, persepsi dan perilaku politik yang unik. Fatwa kiyai adalah referensi utama dalam menyikapi dan mengakomodasi peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan politik. Lebih-lebih dalam anggapan bahwa peristiwa atau kegiatan politik sebagai bagian integral dalam agama, fatwa kiyai bisa menjadi rujukan segala bentuk tindakan politik, baik yang bersifat antagonistik maupun yang kompromis terhadap pemerintah. Fatwa se-

macam itu bisa berkembang menjadi mores atau ketentuan sosial yang harus diikuti dan dijalankan, di samping melahirkan sangsi pengucilan sosial apabila diingkari.

Apabila kita simak lagi lembaran-lembaran sejarah politik kita, tradisi dan karisma para kiyai (khususnya di kalangan warga NU) semacam itulah yang dahulu ikut membuat besarnya jumlah suara yang mampu dikumpulkan Masyumi pada saat NU masih berada di dalamnya. Hal serupa terulang lagi pada pemilu 1977 yang lalu pada waktu NU masih menjadi salah satu unsur yang dominan dalam PPP. Tetapi tradisi dan karisma itu pulalah yang diyakini banyak pihak turut menurunkan perolehan suara PPP pada pemilu 1987, pada saat sejumlah kiyai tidak merasa perlu memberi dukungan partai ini. Pada pemilu 1992 yang lalu, tatkala sejumlah kiyai mulai melirik PPP, perolehan suara partai inipun ikut naik lagi. Bahkan di beberapa tempat perolehan suara PPP terlihat bersaing ketat dengan Golkar.

Pemuda, Politik dan Pemilu

Apabila betul pemuda telah menjadi salah satu kelompok yang mempunyai kontribusi yang sangat berarti bagi perolehan suara organisasi politik kontestan pemilu, pertanyaan berikutnya yang relevan diajukan adalah keuntungan politik apakah yang selama ini diperoleh kelompok tersebut? Status dan peran politik

apakah yang sudah mereka dapatkan? Jawaban atas pertanyaan semacam ini dapat dipergunakan untuk menggambarkan pola interaksi sosial yang selama ini terjalin antara organisasi sosial politik dengan kelompok pemuda. Interaksi sosial tersebut paling tidak memiliki dua sifat: (1) menguntungkan satu pihak saja, dan (2) menguntungkan kedua belah pihak.

Sebelum jauh menelusuri masalah itu, marilah kita lihat kembali apa konsep pemuda dan bagaimana wajahnya kini. Istilah pemuda lazim dikonsepsikan sebagai salah satu bentuk komunitas yang terutama dibingkai oleh kurun umur. Pada pembicaraan ini, kurun umur bukan semata-mata dalam pengertian memiliki kesamaan biologis atau tahun lahir, tetapi lebih dari itu adalah kesamaan pola bersikap, bertingka-lahlaku dan berpikir. Biasa dikatakan pula bahwa dalam komunitas semacam ini terdapat kesadaran mewujudkan cita-cita politik tertentu yang tidak selalu harus sesuai dengan generasi sebelumnya. Itulah sebabnya menjadi mudah dimengerti apabila kemudian mereka kerap kali membangun melembagakan hubungan sosial dan perilaku politik tertentu yang unik sesuai dengan tuntutan zamannya.

Kalau kita melihat aspirasi pendidikan pemuda, hasil kreativitas mereka dan aktivitas organisasi mereka, harus diakui sangat membanggakan sekali. Mereka telah me-

nunjukkan buah karya yang luar biasa, tak kalah dengan pemuda-pemuda mancanegara. Tetapi gambaran semacam ini sebenarnya hanyalah *portrait* dari sebagian wajahnya saja. Apabila kita melihat peran politik komunitas itu, sampai sekarang sebenarnya masih agak marjinal. Dalam struktur umur para pejabat teras dalam lingkaran elit birokrasi atau eksekutif misalnya, akan terlihat bahwa kelompok tua masih dominan. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: berapa persen jumlah menteri yang tergolong muda, berapa persen jumlah gubernur atau bupati yang tergolong muda, akan menunjukkan bukti masih tetap adanya dominasi kelompok tua. Kecenderungan semacam itu sebenarnya juga terdapat dalam badan legislatif, dan pimpinan-pimpinan teras partai politik. Harapan untuk memberi ajang agar pemuda berkiprah dalam masalah politik terasa masih terkulum dalam cita-cita. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa harapan tersebut sukar diwujudkan? Sebagian kelihatannya berada pada mekanisme rekrutmen politik yang melembaga selama ini, dan sebagian lagi berada pada kondisi obyektif pemuda kita sendiri. Sistem rekrutmen politik yang melembaga dalam masyarakat kita yang majemuk ini, masih sulit menghindari bicarannya variabel-variabel daerah asal, etnis atau agama, belum menyentuh kategori generasi. Tentu saja ada pula sebagian pemuda yang kemudian menempati posisi kunci. Tetapi posisi itu diberikan lebih banyak

karena pertimbangan daerah asal, etnis atau agama.

Apa yang sampai sekarang terjadi adalah baik dalam badan eksekutif, legislatif maupun pada kehidupan organisasi sosial dan politik, belum ada proses regenerasi seperti yang selama ini dikehendaki. Seperti pernah dikatakan oleh sejumlah pengamat politik bahwa pada saat tingkat umur dalam masyarakat menjadi semakin muda, perwakilannya justru tetap bertahan pada berumur tua. Ada kesan kemudian kelompok yang berpeluang menjadi anggota badan legislatif atau menempati posisi-posisi kunci dalam organisasi sosial dan politik bukan dipilih dari kaum muda yang mempunyai pikiran segar, tetapi mereka yang mempunyai kesetiaan yang tinggi, meskipun mungkin usianya sudah tua. Apabila kesan ini benar, maka apa yang lazim dikatakan dalam pepatah *fathers know the best*, masih bercokol kuat dalam kehidupan politik kita.

Seerti telah dikemukakan di depan situasi semacam itu sebagian juga karena kondisi obyektif pemuda sendiri. Bersamaan dengan lajunya modernisasi di negeri ini, kita menghadapi masalah kesempatan kerja. Pemerintah memang tak pernah berhenti mengusahakan kesempatan kerja baru. Sawah-sawah baru terus dicetak. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian terus berjalan. Berbagai macam industri kecil kerajinan terus ditingkatkan. Baik industri

hulu maupun industri hilir terus diperkuat. Investor-investor profesional terus diundang datang. Tetapi seperti diakui oleh pemerintah sendiri bahwa masalah kesempatan kerja masih berada pada deretan atas pada prioritas persoalan yang membutuhkan pemecahan. Salah satu kelompok yang terkena imbas langsung, bahkan mungkin yang paling menderita akibat dari persoalan itu adalah pemuda. Sebagian mereka terjebak pada lingkaran yang tak berujung pangkal. Pada jaman kompetisi seperti sekarang, untuk bisa bekerja di sektor formal dibutuhkan kualifikasi pengalaman kerja. Padahal di sini, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang, pengalaman kerja terutama bisa diperoleh apabila pernah bekerja.

Dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah sebenarnya telah mencaangkan berbagai macam program untuk menanggulangi kemiskinan. Pemerintah dengan berbagai macam cara telah berhasil mengidentifikasi wajah kemiskinan, baik yang berada di pedesaan maupun perkotaan. Kita pun diberi gambaran (meskipun masih samar-samar) bagaimana dimensi kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural tumbuh di negeri ini. Pemerintah telah berupaya mengidentifikasi siapa golongan yang paling miskin, di mana mereka berada, kemudian mengintroduksi strategi-strategi tertentu untuk menanggulunginya. Tetapi, apabila kita sedikit jujur mengakui, tingkat penge-

tahuan kita dewasa ini tentang keanekaragaman wajah kemiskinan di kalangan pemuda sebenarnya masih terbatas. Kita belum tahu pasti siapa dan berada di mana mereka.

Banyak pengamat mengungkapkan bahwa tidak sedikit di antara pemuda yang terpaksa bekerja pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan ijasanya. Tidak sedikit di antara mereka yang harus mau bekerja apa saja, termasuk pada sektor-sektor yang sebenarnya tidak menjanjikan pendapatan yang memuaskan. Keadaan semacam ini kemudian menyebabkan apa yang lazim disebut *underutilized*. Keadaan semacam ini apabila tidak diantisipasi dengan baik bisa menumbuhkan gerakan-gerakan yang anti kemapanan yang kondusif bagi terciptanya non-konformitas sosial. Sejak tahun 1970-an usaha-usaha untuk memerangi masalah-masalah semacam itu sebenarnya telah dilakukan, termasuk yang dilakukan oleh LSM dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren, misalnya, telah lama mencaangkan program pendidikan yang tidak hanya mencetak orang yang mumpuni memikirkan agama (*tafaq-qohu fid din*), tetapi juga alumni yang siap berkompetisi menciptakan lapangan kerja. Hanya saja, seperti diakui sendiri oleh sejumlah pesantren hasilnya masih belum menggemibirkan. Itulah sebabnya menjadi mudah dipahami apabila usaha-usaha membangun kesadaran sebagian mereka sebagai suatu generasi pene-

rus menjadi tidak berjalan mulus. Struktur interaksi sosial yang mereka bangun juga masih terasa belum kondusif bagi mewujudkan kesamaan pola bersikap dan bertingkah laku mencapai cita-cita yang secara politis terkait dengan perjalanan hidup berbangsa dan bernegara. Terutama karena sebagian besar mereka masih disibukkan oleh mencari strategi *survival* dalam menghadapi lilitan persoalan ekonomi yang datang bersamaan dengan proses modernisasi.

Dari uraian tersebut kelihatan bahwa interaksi sosial yang selama ini terjalin antara organisasi sosial politik dan kelompok pemuda sebenarnya masih lebih banyak menguntungkan organisasi sosial politik. Di kalangan sebagian besar mereka nampaknya masih belum memiliki komitmen kuat masa depan bangsa berada di tangan pemuda. Di kalangan sebagian besar mereka nampaknya masih belum mempunyai komitmen kuat menciptakan kondisi yang kondusif bagi menguatnya peran politik pemuda, walaupun setiap kali menjelang Pemilu hampir setiap juru kampanye organisasi sosial politik lantang menyatakan bahwa alih generasi bukan hanya perlu, tetapi adalah tuntutan sejarah yang tidak terelakkan. Begitu Pemilu usai, semuanya berlalu. Di sinilah terasa pemuda masih mereka tempatkan sebagai obyek atau pemilih potensial yang perlu digarap, dan belum sebagai subyek atau aktor politik yang perlu diberi posisi membangun peran

politik pemuda. Janji-janji dan harapan-harapan yang disampaikan oleh organisasi sosial politik pada saat kampanye hanya sebagian kecil saja yang terealisasi.

Kiyai, Politik dan Pemilu

Di depan telah dikemukakan bahwa kiyai dan ulama telah menjadi salah satu pilar yang dapat meningkatkan perolehan suara organisasi politik kontestan pemilu. Sekali lagi, pertanyaannya adalah keuntungan politik apakah yang mereka dapatkan selama ini? Lalu bagaimana kira-kira gambaran status dan kedudukan kiyai dalam percaturan politik sekarang? Masihkah kiyai mempunyai posisi yang determinan dan mewarnai keputusan-keputusan politik?

Untuk menjawab pertanyaan semacam itu, marilah kita lebih dahulu melihat perspektif sosiologi dalam membahas masalah kepemimpinan.

Masalah kepemimpinan paling baik dapat dibahas dalam tiga dimensi yaitu: dimensi legitimasi, dimensi pengaruh dan dimensi visibilitas. Dari dimensi legitimasi terdapat istilah pemimpin *formal* atau yang kukuhkan berdasarkan ketentuan resmi, serta pemimpin informal atau yang ditetapkan berdasarkan penggunaan adat dan kebiasaan. Kemudian dimensi pengaruh adalah melihat luas atau kiprah pemimpin. Pemimpin bisa berpengaruh dalam beberapa bidang sekaligus atau lazim disebut menyandang kepemimpinan yang bersifat *polymorphic*. Tetapi pemimpin

bisa juga hanya berpengaruh pada satu bidang saja atau lazim disebut menyandang kepemimpinan yang bersifat *monomorphic*. Dimensi pengaruh ini lazimnya berkaitan dengan struktur kekuasaan yang berkembang dalam masyarakat. Kepemimpinan yang bersifat *monomorphic* lebih banyak berkembang dalam kehidupan masyarakat yang berstruktur kekuasaan pluralistik (majemuk), sedangkan kepemimpinan yang bersifat *polymorphic* lebih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat yang berstruktur kekuasaan monolitik.

Selanjutnya dimensi visibilitas melihat derajat pengakuan baik dari massa yang dipimpinnya maupun pemimpin-pemimpin lain. Pemimpin digolongkan sebagai *visible leader* apabila didukung massa sekaligus diakui oleh pemimpin-pemimpin lain. Tetapi apabila pemimpin itu hanya didukung oleh massa dan tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin lain, maka lazim dikategorikan sebagai *symbolic leader*. Sebaliknya apabila pemimpin tidak banyak memperoleh dukungan massa, tetapi sebenarnya diakui oleh pemimpin-pemimpin lain, maka lazim dikategorikan sebagai pemimpin tersembunyi (*concealed leader*)

Pertanyaannya berikutnya adalah masihkah kiyai menyandang kepemimpinan yang bersifat *polymorphic* atau sebagai pemimpin yang berpengaruh dalam masalah keagamaan sekaligus masalah sosial politik? Kelihatannya dalam sepuluh tahun terakhir ini sudah mulai terjadi

penulis lakukan di Jombang (1990)² dan di Kudus (1994)³ memperlihatkan kecenderungan bahwa peranan kiyai dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial politik semakin di pinggirkan. Peranan mereka tidak sehebat dulu. Pada level nasional, kita juga sudah semakin jarang menyaksikan peristiwa monumental seperti yang terjadi pada akhir tahun 1970-an yang lalu tatkala beberapa kiyai dengan berani tampil ke depan memimpin aksi *walk out* menentang kehadiran Undang-Undang Perkawinan. Tentu saja masih ada kiyai yang sangat diperhatikan dalam proses formulasi dan eksekusi keputusan politik, tetapi secara umum peranan mereka semakin marginal.

Kecenderungan tersebut paling tidak dapat ditelusuri dari dua hal. Pertama, sebagai konsekuensi dari strategi pembangunan yang menjadi pilihan pemerintah. Kegiatan pembangunan ekonomi kita bukan hanya masih banyak mengedepankan pertumbuhan melainkan juga ditandai oleh strategi yang sentralistis, diken-

dali dari pusat dan lebih banyak melalui saluran birokrasi. Alasan derivatif yang lazim dikemukakan adalah target yang harus dicapai sangat luas, padahal dana yang tersedia terbatas. Strategi sentralistis lalu dianggap ampuh menjawab persoalan itu. Dampaknya kemudian adalah para birokrat (para pemimpin formal) berada pada posisi sentral. Sedangkan para pemimpin informal (termasuk para kiyai) semakin berada di pinggiran.

Konsekuensinya kemudian adalah atribut pemimpin *polymorphic* yang pernah disandang kiyai agak semakin memudar. Para kiyai lebih didambakan berkecimpung dalam masalah keagamaan saja, dan bukan pada masalah sosial politik.

Kedua, sebagai konsekuensi dari pilihan strategi politik massa mengambang (*floating mass*). Strategi ini memang amat ampuh meredam kemungkinan terjadinya pengotakan ideologi yang potensial menciptakan terjadinya konflik dalam masyarakat. Tetapi di lain sisi ternyata mengurangi akses para kiyai (termasuk juga para pemimpin informal lainnya) pada percaturan politik.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa menjelang pertengahan tahun 1980-an yang lalu NU kembali ke *khitah* 1926. Dalam *khitah* itu NU berikrar bahwa bukan hanya keluar dari PPP tetapi juga tidak menjadi bagian dari organisasi politik apa pun. Warga NU bebas memilih organisasi politik yang disukai. Warga

2. Usman, *Local Elites and Development*, (Flinders University Australia, 1990), disertasi (tidak diterbitkan).

3. Usman, *Politik, Taqlid dan Interaksi Guru-Murid dalam Tarekat*, (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada, 1994)

boleh menjadi anggota PPP, Golkar dan bahkan PDI. Khitah tersebut pada awalnya memang berhasil membangun citra "NU berada di mana-mana". Warga NU yang pegawai negeri tidak merasa risi lagi menjadi Golkar. Di Pekalongan, ada tokoh NU yang menjadi anggota DPRD Tingkat II wakil dari PDI. Kasus semacam ini memang agak istimewa, karena hampir tidak ditemukan di tempat-tempat lain. Kenyataan semacam itu tidak bakal terjadi andaikata NU masih tetap menjadi bagian dari PPP. Setelah *khitah*, sebagian kiyai merasa tidak perlu lagi terjun ke arena politik praktis. Mereka lebih suka berkontribusi pada urusan dakwah. Bagi mereka masalah politik adalah urusan PPP, Golkar dan PDI, bukan urusan NU. Itulah sebabnya menjadi tidak mengherankan apabila mereka kemudian lebih suka hanya menyandang pemimpin keagamaan saja. Kiyai tidak perlu "ke mana-mana". Pondok pesantren adalah tempat untuk menimba ilmu agama, bukan untuk mengaji politik. Meskipun begitu tidak berarti mereka anti kegiatan politik.

Lalu bagaimana kepemimpinan kiyai dari dimensi visibilitas? Bagaimana derajat pengakuan massa yang dipimpinnya? Bagaimana pula derajat pengakuan pemimpin-pemimpin lain? Sebagian besar kiyai sampai kini masih dalam kategori *visible leader*, artinya masih memperoleh dukungan dari massa dan tetap diakui oleh pemimpin-pemimpin lain. Barangkali

memang ada pula kiyai yang sudah tergolong dalam kategori *symbolic leader* (hanya memperoleh dukungan massa besar tetapi sebenarnya tidak diakui oleh pemimpin-pemimpin lain), atau ada pula yang sudah tergolong dalam kategori *concealed leader* (tidak banyak memperoleh dukungan massa tetapi diakui oleh pemimpin-pemimpin lain), namun jumlahnya tidak banyak, dan boleh jadi hanya ditemukan di beberapa daerah saja.

Tetapi karena dari segi pengaruh kebanyakan kiyai pada saat ini hanya menyandang kepemimpinan yang bersifat *monomorphic* (dalam masalah keagamaan saja), maka pengakuan tersebut lebih banyak hanya dalam masalah keagamaan saja. Dengan kata lain pengakuan tersebut tidak menyetujui masalah sosial politik. Baik umat maupun pejabat sampai sekarang masih mempunyai tradisi *silaturahmi* atau *sowan* kepada kiyai. Tetapi *sowan* mereka lebih banyak untuk urusan keagamaan, bukan untuk urusan politik. Hasil studi penulis di Kudus (1994) misalnya memperlihatkan bahwa banyak murid-murid tarekat (baik tarekat *Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah* maupun tarekat *Naqsyabandiyah Khalidiyyah*) yang pilihan partai politiknya berdasarkan kemauannya sendiri, bukan atas anjuran guru atau kiyai *mursyid*-nya. Setiap menjelang Pemilu sebagian dari murid-murid tersebut memang masih *sowan* meminta fatwa kiyai *mursyid*-nya. Tetapi para guru sendiri ternyata menghindari per-

mintaan fatwa masalah itu, malah justru sering memberi kesan seakan-akan semua partai adalah baik. Sebagian dari guru-guru tarekat yang diwawancarai juga menyatakan bahwa semua partai sudah berasaskan Pancasila, karena itu hampir tidak ada bedanya.

Para pejabat, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan sampai sekarang masih memelihara tradisi *sowan* kepada kiyai. Tetapi kehadiran mereka bukanlah untuk membahas masalah politik. Kehadiran mereka lebih banyak mencari "penasehat spiritual" yang diharapkan dapat ikut memperlancar perencanaan dan implementasi pembangunan di daerahnya. Beberapa pejabat yang diwawancarai menyatakan bahwa para kiyai memang masih mempunyai karisma, segala fatwanya masih diikuti oleh ummat. Para pejabat tersebut sangat yakin para kiyai memberi banyak dukungan berbagai macam program yang telah dicanangkan.

Dengan demikian apakah panggung politik sudah tertutup bagi kiyai? Tentu saja tidak. Masih ada sejumlah kiyai yang tetap terjun ke arena politik praktis. Merekalah yang termasuk membidani beberapa pertemuan menjelang diadakan muktamar PPP tahun 1994 lalu. Gagasan-gagasan politik mereka tetap jernih, aktual dan mengikuti perkembangan jaman. Mereka bukan hanya diperhitungkan oleh elit-elit politik lain, tetapi juga mempunyai pendukung yang cukup

kuat. Seperti telah banyak dikemukakan pengamat, kelompok ini sangat piawai melakukan manuver politik, termasuk dalam suksesi kepemimpinan PPP. Hanya sayangnya manuver politik yang mereka lakukan seringkali hanya diartikan sebagai usaha menggeser atau merebut kursi pimpinan partai. Padahal sebenarnya kalau kita agak jernih melihatnya, manuver politik yang mereka lakukan bisa bermakna suatu upaya menumbuhkan pluralitas struktur kekuasaan dalam partai. Kalau tidak ingin segera lejang dan lapuk, struktur kekuasaan partai tidak boleh monolit atau memuncak hanya bergantung pada orang-orang tertentu saja. Dalam struktur kekuasaan yang monolit, keputusan-keputusan krusial hanya dibuat atau berada di tangan beberapa gelintir orang saja terutama yang berada di puncak pimpinan. Pola semacam ini tidak sehat sebab sangat dimungkinkan terjadi manipulasi. Karena itu usaha para kiyai menumbuhkan pluralitas dalam tubuh partai politik perlu dihargai. Persoalannya barangkali bagaimana menjaga pluralitas tersebut tetap dalam suasana kohesif, atau tidak menumbuhkan konflik kepentingan.

Manuver politik seperti dilakukan sejumlah kiyai menjelang muktamar PPP yang lalu barangkali bisa juga bermakna upaya mengembangkan keterbukaan dalam tubuh partai. Ini juga bisa ditularkan pada organisasi-organisasi sosial dan politik lain, terutama untuk menjaga jangan sam-

pai ada "api dalam sekam". Manuver politik tersebut juga memberi pelajaran bahwa dalam upaya mendewasakan kehidupan politik ini perlu transparan, *fair play*, sehingga tidak melahirkan pimpinan-pimpinan "tiban". Dengan kata lain siapa kader yang layak memimpin organisasi-organisasi sosial dan politik harus transparan sejak dini, terutama untuk menghindari penetrasi kekuatan luar. Apa pun dalihnya, setiap bentuk penetrasi dari luar adalah tidak sehat bagi perkembangan suatu partai politik. Tentu saja keterbukaan yang dilontarkan bukan hanya tetap harus bereferensi pada aturan main yang telah disepakati, melainkan juga harus ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan, dan bukan tujuannya sendiri. Tujuannya sudah barang tentu adalah kedewasaan berpolitik bagi kesejahteraan umat. Hanya sayangnya pemikiran semacam itu kurang berkembang.

Sementara itu, di kalangan sebagian umat sendiri kelihatannya berkembang pandangan bahwa kiyai seharusnya tidak perlu terlalu jauh terlibat dalam masalah politik praktis. Bagi mereka, kiyai adalah penjaga rohani umat, karena itu seyogyanya tidak memihak partai politik tertentu. Seperti telah pula disampaikan di depan, pandangan semacam ini lebih banyak dibingkai oleh kehendak bahwa pondok pesantren adalah tempat mengaji ilmu agama, bukan mengaji politik. Dalam benak mereka tampaknya terendap keinginan 'memur-

nikan' fungsi dan kedudukan pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren hanyalah sebagai tempat sosialisasi ajaran Islam, dan kiyai adalah guru pemeliharannya.

Pandangan semacam itu semakin merebak. Mengapa? Pertama, sebagaimana kita ketahui bersama, Partai Persatuan Pembangunan (baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah) lebih banyak dikuasai Muslimin Indonesia. Nahdlatul Ulama semakin marjinal. Dalam kondisi demikian panggung politik bagi kiyai ikut menjadi semakin sempit. Benar memang ada sejumlah kiyai yang aktif di Golongan Karya, tetapi pada umumnya mereka juga berada di pinggir dan kurang dominan. Kedua, skenario politik nasional kita tampaknya memang cenderung memisahkan agama dan politik. Undang-undang kepartaian kita tidak lagi mengenal partai agama atau partai Islam, semua partai (termasuk PPP) berasaskan Pancasila. Karena itu menjadi mudah dipahami apabila fatwa politik kiyai menjadi kurang begitu determinan dalam kegiatan partai politik⁴

Catatan Akhir

Dari segenap uraian yang telah

4. Pembahasan masalah Islam dan politik di Indonesia antara lain dapat dilihat dalam Douglas E. Ramage, *Politics in Indonesia, Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*, (London: Routledge, 1995).

dikemukakan terlihat bahwa meskipun kelompok pemuda, kiyai atau ulama selama ini memiliki kontribusi yang sangat berarti bagi perolehan suara organisasi politik kontestan Pemilu, namun mereka belum banyak memperoleh keuntungan politik, bahkan dalam kancah politik mereka semakin marginal. Keuntungan masih lebih banyak diraup oleh organisasi politik. Tendensi semacam ini tentu kurang begitu baik bagi kehidupan politik. Setelah Pemilu usai, organisasi politik tidak boleh *tinggal glanggang colong playu* ("melarikan diri" dari tanggung jawab), tetapi sebaliknya harus menawarkan dan membangun alternatif model pemberdayaan politik bagi mereka. Masa depan bangsa ini sebagian ditentukan oleh kesiapan pemuda. Sungguh sukar dibayangkan apa yang bakal terjadi apabila pemuda dihindangi apatisme dan alergi pada masalah-masalah politik.

Selanjutnya barangkali sudah tiba saatnya perlu dipikirkan kembali bagaimana agar para kiyai tetap mempunyai perhatian terhadap masalah politik tanpa harus menghilangkan identitas keulamaannya. Sebagaimana diyakini oleh sebagian kiyai sendiri bahwa politik tidaklah harus dihindari dan berpolitik bukanlah sesuatu yang tabu, sebab sesungguhnya merupakan bagian integral dari aspek kehidupan itu sendiri. Pembangunan ekonomi saja belum cukup, tanpa disertai dengan pembangunan politik yang kokoh. Tentu saja sia-sia hidup ini apabila terus-

menerus dieksploitasi dan dalam posisi subordinasi. Hanya persoalannya sekarang adalah bagaimana menciptakan ramuan politik yang memberi kesejukan bagi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini. Ini tentu bukan barang mudah. Tetapi juga bukan sesuatu yang mustahil, sebab seperti dikemukakan pada bagian depan tulisan ini ajaran Islam memiliki kandungan ibadah muamalah yang di dalamnya antara lain terdapat aturan kepemimpinan, distribusi kekuasaan, hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dan sebagainya. Karena itulah partisipasi kiyai dalam ikut membahas masalah-masalah politik masih relevan dan mempunyai kontribusi yang amat berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterlibatan kiyai dalam masalah politik diyakini mampu menegakkan kebenaran dan menghapus adanya eksploitasi dan dominasi.

Daftar Bacaan

- Jangam, R.T. 1980. *Political Sociology*. (New Delhi: Oxford & IBH Publishing Co.)
- Ramage, Douglas E. 1995. *Politics in Indonesia, Democracy, Islam and the Ideology of Tolerance*. (London: Routledge)
- Usman, Sunyoto. 1990. *Local Elites and Development*. (Flinders University, Australia). Disertasi. Tidak diterbitkan.

Usman, Sunyoto. 1994. *Politik, Taqlid dan Interaksi Guru-Murid dalam Tarekat*. (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial, Universitas Gadjah Mada)

Wasburn, Philo C. 1982. *Political Sociology: Approaches, Concepts, Hypothesis*. (New Jersey Englewood Cliffs, Prentice-Hall, Inc.)